



ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM **KPK**

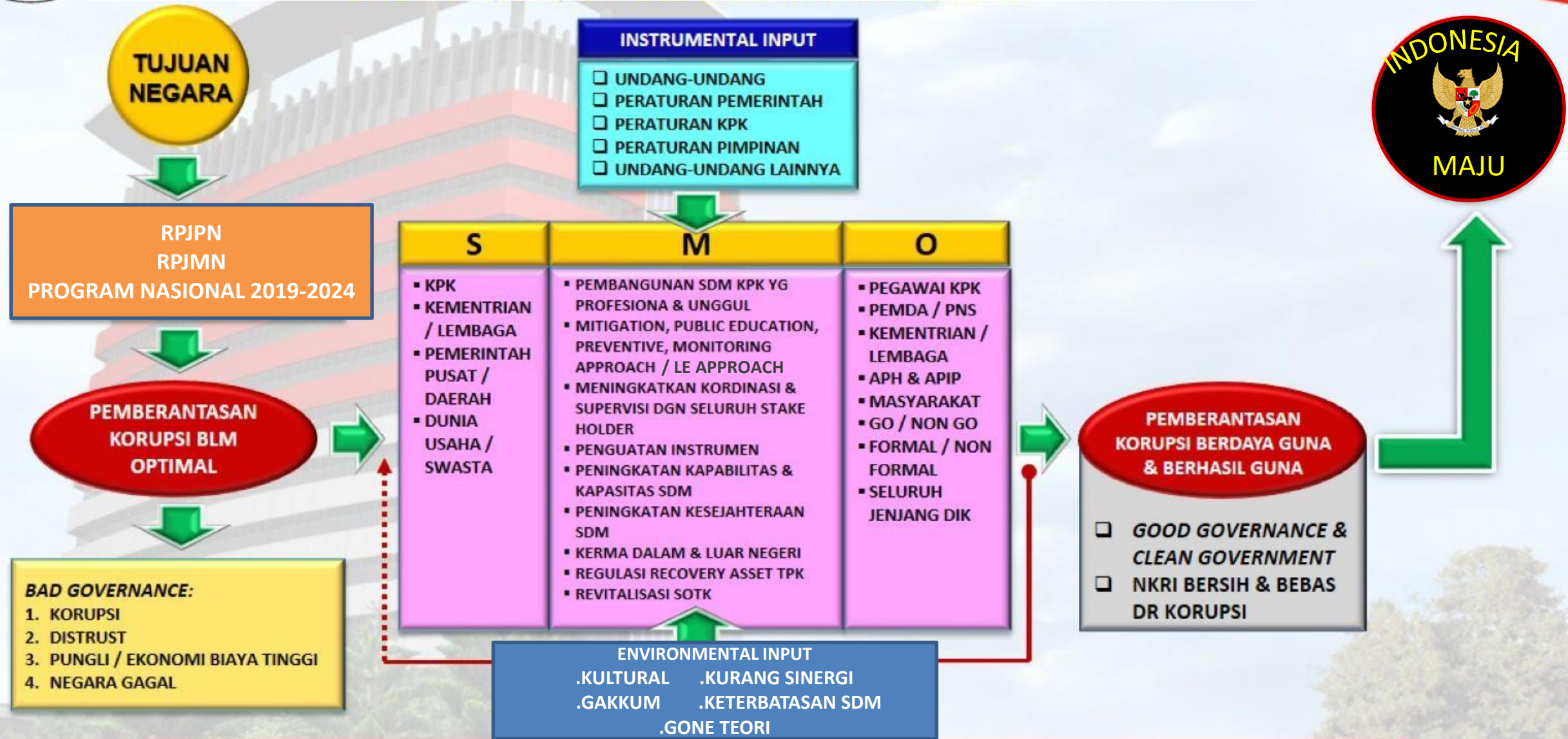
Komisi Pemberantasan Korupsi
TAHUN 2020



Jakarta, 20 Februari 2020



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU



VISI

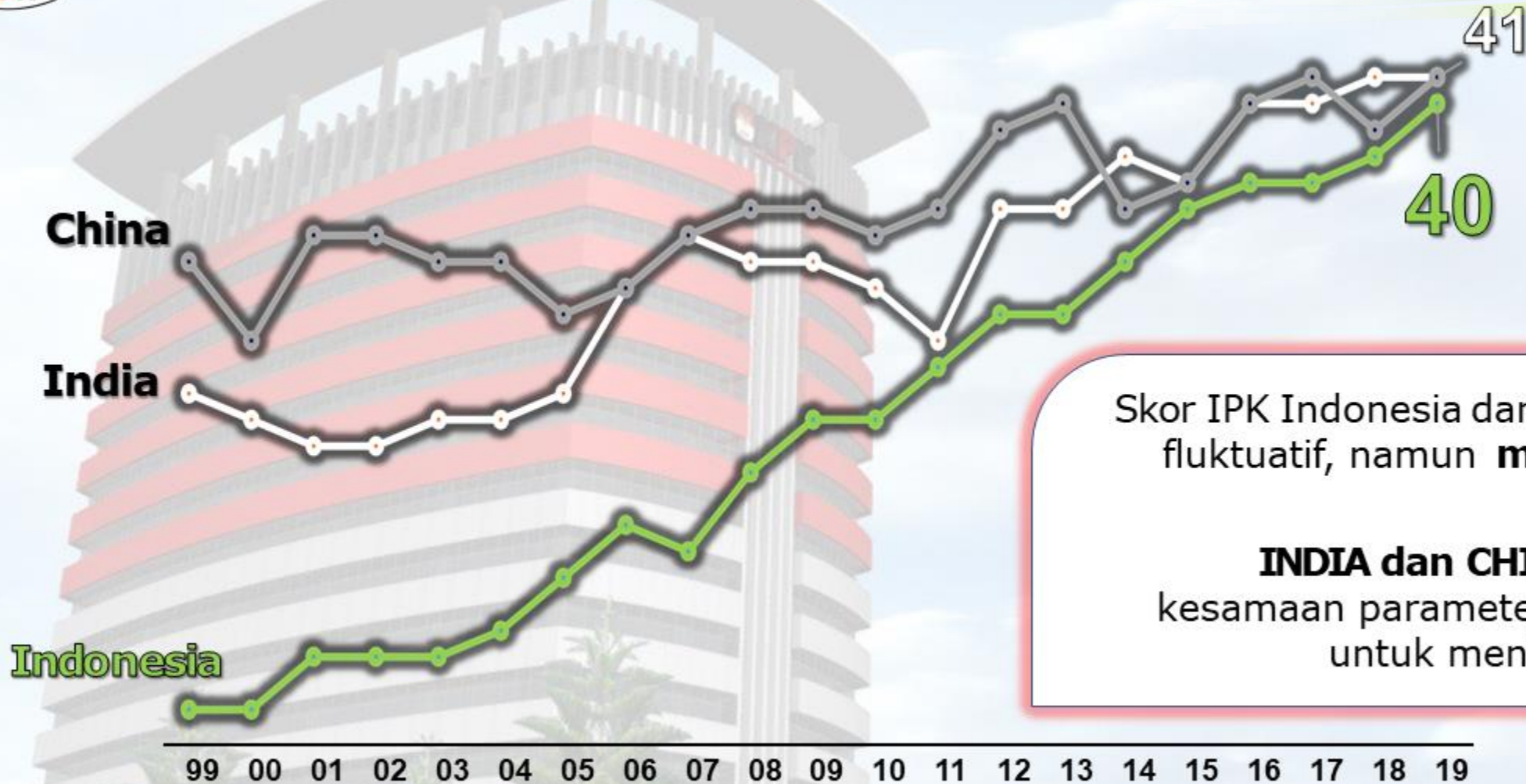
Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia maju bebas dari korupsi

MISI

1. Memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (pasal 6a)
2. Meningkatkan sinergisitas pencegahan dan penindakan melalui koordinasi seluruh elemen terkait dalam upaya pemberantasan TPK (pasal 6b)
3. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya TPK (pasal 6c)
4. Mengefektifkan supervisi terhadap instansi yang berwenang
5. Melaksanakan Pemberantasan TPK (pasal 6d)
6. Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara hasil TPK (pasal 6e dan f)
7. Mewujudkan transformasi organisasi, SDM, sistem informasi dan data berbasis digital



CORRUPTION PERCEPTION INDEX

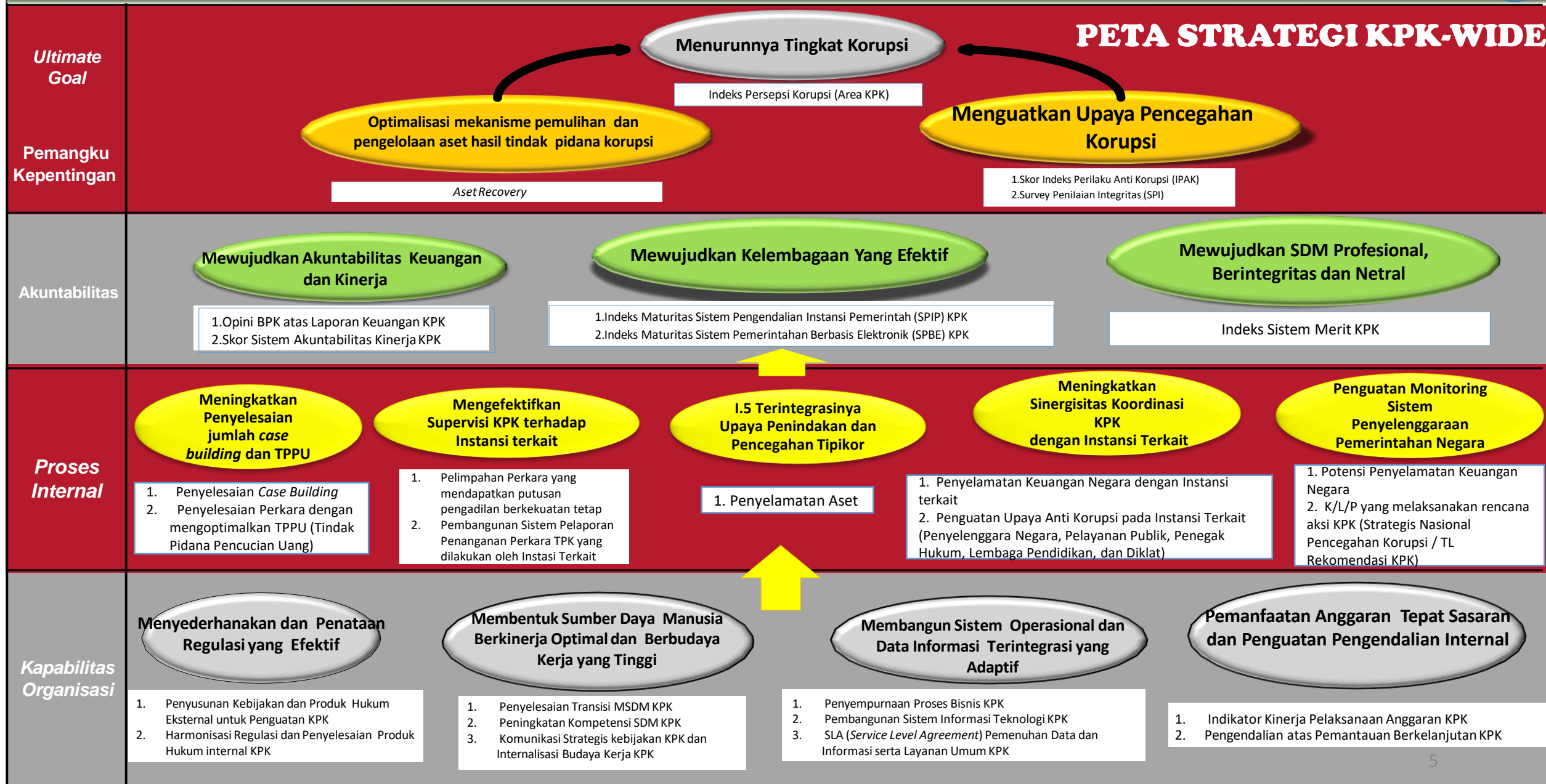


Skor IPK Indonesia dari tahun 1999-2019 fluktuatif, namun **menunjukkan tren positif.**

INDIA dan CHINA dipilih karena kesamaan parameter yang digunakan untuk menilai IPK Indonesia

Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia maju bebas dari korupsi

5





**OPTIMALISASI
PENGEMBALIAN
KERUGIAN
NEGARA HASIL
TPK**



**OPTIMALISASI
SISTEM
PENCEGAHAN
YANG EFEKTIF**



**PENGUATAN
MONITORING
SISTEM
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI**



**ENABLER YANG
PROAKTIF**

GRAND STRATEGY



TUJUAN STRATEGIS (ULTIMATE GOAL) DARI KPK ADALAH MENURUNKAN TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA DENGAN INDIKATOR KEBERHASILAN :

Penggunaan data survei nilai **WJP** (*World Justice Project*) dan **PERC** (*Political Risk & Economic Survey*) yang menjadi bagian perhitungan **CPI**

Penggunaan data **ZI WBK WBBM**, **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)** dan **Survei Penilaian Integritas (SPI)**



Sasaran Strategis (KPK WIDE)

KPK
AKAN BERFOKUS PADA:

PENCEGAHAN

PENINDAKAN

PENINGKATAN CPI
INTERVENSI untuk meningkatkan nilai
WJP (World Justice Project) dan PERC
(Political Risk & Economic Survey) yang
menjadi perhitungan CPI

Kolaborasi pencegahan dan penindakan

- Preventif for law enforcement
- Law enforcement for preventif

STRANAS PK

MITIGASI

KOORDINASI

MONITORING

DIKYANMAS

PENEGAKAN HUKUM DENGAN PRIORITAS
PENGEMBALIAN KERUGIAN UANG NEGARA
MELALUI ASSET RECOVERY





FOKUS AREA KPK DALAM MENDUKUNG Sasaran Strategis (KPK WIDE)



Pembangunan
SDM



Pembangunan
Infrastruktur



Penyederhanaan
Regulasi



Penyederhanaan
Birokrasi



Transformasi
Ekonomi

5 KEBIJAKAN
PRESIDEN

Sasaran Program

Setiap fungsi akan melaksanakan program yang mendukung sasaran strategis KPK

Koordinasi dan supervisi difokuskan pada status perkara yang ditangani APGAKUM (Kepolisian dan Kejaksaan) sampai mendapatkan kepastian hukum



Penindakan akan difokuskan pada *case building* (bangun kasus) sehingga meningkatkan persentase *asset recovery* (pemulihan asset)

Manajemen & dukungan teknis lainnya untuk mewujudkan transformasi organisasi, SDM, sistem Informasi dan data berbasis digital



Pencegahan dengan intervensi pada pembangunan SDM dan Infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan nilai WJP (*World Justice Project*) dan PERC (*Political Risk and Economic Survey*) yang menjadi bagian perhitungan CPI

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pencegahan & penindakan)

Sejalan dengan Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Pasal 3
Perpres RI No. 54/2018)



3 Fokus

11 Aksi

27 Sub Aksi

Stranas PK

Arah kebijakan nasional yang memuat focus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda, dan *stakeholder* dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia

Perizinan dan
Tata Niaga

Keuangan
Negara

Penegakan Hukum
dan RB

Implementasi OSS
25 Aplikasi
32 K/L

E-catalogue sectoral
di Kemenhub dan
Kementan

Konsep
pengawasan dana
desa oleh APIP
Kabupaten

Integrasi NIK
Kemensos dan
Kemendagri
75%

E-catalogue local di
Provinsi Jawa Barat
dan DKI Jakarta



PERKARA KORUPSI

20 DESEMBER 2019 – 20 FEBRUARI 2020



TOTAL PENYELIDIKAN AKTIF = 325 KASUS

KASUS PENYELIDIKAN DITERBITKAN SPPP = 36 KASUS

SPRINDIK : 21

TAMBAHAN, 2 KASUS (NAIK SIDIK) YANG DILIMPAHKAN
KE UNIT KORSUP (26 DESEMBER 2019).



PERKARA KORUPSI

20 DESEMBER 2019 – 20 FEBRUARI 2020



13



TERSANGKA YANG DITETAPKAN

TERSANGKA YG DITETAPKAN : 18 ORANG

TERSANGKA YANG DITAHAN

TERSANGKA YANG DITAHAN : 17 ORANG

JUMLAH LHA PPAK YANG DITERIMA KPK

LHP & LKTPK : 303

PERKARA YANG DITUNTUT DALAM PERSIDANGAN

25 KASUS

PERKARA YANG SUDAH VONIS ATAU EKSEKUSI

33 KASUS

1 JAN S.D 20 DES 2019

51 LHA DIPEROLEH DARI PPAK

**240 LHA DIPEROLEH DARI
PERMOHONAN KPK KEPADA PPAK**

20 DES 2019 S.D 20 FEB 2020

DITERIMA 12 LHA



JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN

(20 Desember 2019 - 20 Februari 2020)

Waktu	Denda	Uang Pengganti	Rampasan				
			Rupiah	AUD	Taiwan Dollar (TWD)	SGD	USD
20 Des – 31 Des 2019	0	1.600.000.000	1.140.941.500	0	0	0	0
1 Jan - 20 Februari 2020	2.377.000.000	1.745.100.000	28.588.727.631	20	110.000	51.000	41.410
Total	2.377.000.000	3.345.100.000	29.729.669.131	20	110.000	51.000	41.410

**NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN DALAM
MATA UANG RUPIAH ADALAH SEBESAR**

Rp 35.451.769.131

KOMITMEN KOMISIONER KPK 2019 - 2023

1

**PENGUATAN SOLIDITAS & KELEMBAGAAN, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SDM KPK
UTK MENINGKATKAN KUALITAS**

2

HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI

3

**MELAKUKAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH HARUS
DIBERDAYAKAN, DIMULAI DARI PENYUSUNAN RENSTRA, RPNJP DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH**

4

**MELAKUKAN MITIGASI KORUPSI AGAR POTENSI KERUGIAN AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI DAPAT DIMINIMALKAN ATAU BAHKAN DIHILANGKAN,
MELAKUKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KAMPANYE ANTI KORUPSI**

5

**MENATA KEMBALI SOTK → KOORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN, MONITORING PELAKSANAAN
PROGRAM PEMERINTAH, PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG SEMULA UNIT KERJA (SUB BIDANG),
MENJADI BIDANG TERSENDIRI (KEDEPUTIAN) SESUAI DENGAN TUGAS POKOK**

6

MENGEDEPANKAN PENCEGAHAN (PREVENTIF IS MORE BETTER)

7

**MENGOPTIMALKAN PENINDAKAN SEBAGAI UPAYA ULTIMATUM PREMEDIUM DENGAN FOKUS
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN NEGARA**



How Important The Changes !

- ❑ To improve is to change
- ❑ To perfect is to change often
- ❑ To more perfect is to more change often



SELEMBAR DAUN

**Mungkinkah selembaar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini?
Menutupi telapak tangan saja sulit..**

**Tapi kalau daun kecil ini nempel dimata kita,
maka tertutuplah Bumi dengan daun**

**Begitu pula bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun,maka kita akan melihat keburukan dimana-mana,
bumi ini pun tampak buruk..**

Jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil..

Jangan menutup hati kita dengan sebuah pikiran yang buruk walau cuma seujung kuku..

Syukuri apa yang sudah kita miliki,sebagai modal untuk memullakan-Nya

**Semoga kita meraih kebaikan hari ini dan menjadi manusia yang pandal bersyukur
Aamiin...**



SEKIAN TERIMA KASIH



KERANGKA ACUAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020



KERANGKA ACUAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Dasar:

1 UU NO. 28 THN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH & BEBAS DR KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

2 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3 UU NO. 7 THN 2006 TTG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003

4 UU NO. 8 THN 2010 TTG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

5 UU NO. 19 THN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 30 THN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

6 PERATURAN PRESIDEN NO. 54 THN 2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

7 PERATURAN PRESIDEN NO. 61 THN 2019 TTG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

8 PERATURAN PRESIDEN NO. 18 THN 2020 TTG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL THN 2020-2024

9 PERATURAN PIMPINAN KPK NO. 6 THN 2019 TTG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KPK

10 *PLAYING FIELD* (FOKUS AREA KPK):

a Penyelenggara Negara (Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

b RPJMN 2020-2024 & RKP 2020

c *Corruption Perception Index* (CPI)

d Pengukuran Akuntabilitas



ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui pendekatan Tugas KPK pada Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, dan f, dengan memperhatikan:

1. Pasal 1 ayat (4)

2. Pasal 7 ayat (1) dan (2) → Tugas Pencegahan dan Wewenang

3. Pasal 8 → Tugas Koordinasi dan Wewenang

4. Pasal 9 → Tugas Monitor dan Wewenang

5. Pasal 10 [Tugas Supervisi dan Wewenang] → Pasal 10A ayat (1) dan (2)

6. Pasal 11 → Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

a. Pasal 38 dan Pasal 39 (Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan):

1) Penyelidikan → Pasal 44 & Pasal 46

2) Penyidikan → Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 47

3) Penuntutan → Pasal 12A

b. Penyadapan memperhatikan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D

c. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan memperhatikan Pasal 40

7. Pasal 13 [Tugas untuk melaksanakan penetapan hakim & putusan pengadilan serta Wewenang] → Pasal 47A

8. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20 → Kewajiban KPK

9. Penataan SDM & Transisi SDM :

a. Pasal 43, Pasal 45, Pasal 45A

b. Pasal 69B & Pasal 69C

c. Pasal 70A

10. Pasal 37B huruf a (Tugas Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas & wewenang KPK) agar menjadikan perhatian unit kerja dlm pelaksanaan tugas & wewenang

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas KPK) memiliki fokus pada:



Salah satu tujuannya dari Stranas Pencegahan Korupsi adalah meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi yang berorientasi pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun kebijakan strategis KPK. **Korelasi upaya Stranas PK harus memperhatikan Sasaran Strategis Nasional pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020**, sebagai fokus area KPK untuk melakukan Pencegahan Korupsi

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

FOKUS PADA:

1. PEMBANGUNAN SDM
2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3. PENYEDERHANAAN REGULASI
4. REFORMASI BIROKRASI:
 - BIROKRASI YG BERSIH & AKUNTABEL
 - BIROKRASI YG KAPABEL
 - PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA
5. TRANSFORMASI EKONOMI

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN → PRIORITAS NASIONAL:

1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UTK PERTUMBUHAN YG BERKUALITAS
2. MENGEMBANGKAN WILAYAH UTK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERRATAAN
3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
4. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
5. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR
6. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM
7. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

AREA KPK

PRIORITAS NASIONAL →
MEMPERKUAT STABILITAS
POLHUKHANKAM & TRANSFORMASI
PELAYANAN PUBLIK



1. PENATAAN REGULASI:

- ☐ PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA REGULASI
- ☐ PEMBAHARUAN SUBSTANSI HUKUM

2. PERBAIKAN SISTEM HUKUM PIDANA & PERDATA:

- ☐ PENYEMPURNAAN HUKUM EKONOMI UTK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
- ☐ PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
- ☐ DUKUNGAN TI DI BIDANG HUKUM & PERADILAN
- ☐ PENINGKATAN SISTEM INTEGRITAS & PENGAWASAN HAKIM

3. PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI:

- ☐ PENGUATAN IMPLEMENTASI STRANAS CEGAH KORUPSI
- ☐ OPTIMALISASI MEKANISME PEMULIHAN & PENGELOLAAN ASET

4. PENGUATAN AKSES THD KEADILAN:

- ☐ PENGUATAN LAYANAN BERKEADILAN
- ☐ PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 untuk Mendukung Prioritas Nasional Pemerintah 2020



ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang PENCEGAHAN

MELAKUKAN TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS KOORDINASI DAN TUGAS MONITOR → MENGEDEPANKAN PENGUATAN UPAYA ANTI KORUPSI PADA *LOCUS* YG TERDAMPAK PADA:

- Pengukuran CPI
- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
- Survey Penilaian Integritas (SPI)
- Pengukuran RKP 2020 & RPJMN 2020-2024 (termasuk pemindahan Ibu Kota Negara)

MENDORONG K/L/D UNTUK MENINGKATKAN PENGUKURAN NASIONAL MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

- Upaya pencegahan korupsi
- Reformasi birokrasi & peningkatan kualitas pelayanan publik
- Melakukan pemantauan atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan kepada K/L dan Pemda

MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN STRANAS PK, TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS KOORDINASI, DAN TUGAS MONITOR

MEMPERBAIKI TATA KELOLA TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS KOORDINASI, DAN TUGAS MONITOR, DENGAN MENYUSUN PEDOMAN:

- Pencegahan terintegrasi
- Pencegahan & penindakan terintegrasi
- Standardisasi metode perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring & evaluasi di bidang pencegahan
- Pengelolaan data & informasi pencegahan terintegrasi yang responsif baik sifatnya strategis maupun periodik

MENYUSUN PETA PROSES BISNIS

- Pencegahan terintegrasi (melibatkan tugas Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas monitor, dan tugas fungsi pendukung lainnya) dalam menguatkan upaya pencegahan korupsi
- Pencegahan & penindakan terintegrasi (melibatkan tugas penindakan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring & tugas fungsi pendukung lainnya) serta implementasi upaya pencegahan & penindakan terintegrasi

MELAKUKAN KERJA SAMA BILATERAL ATAU MULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang PENINDAKAN

OPTIMALISASI MEKANISME PEMULIHAN DAN PENGELOLAAN ASET

1. PENANGANAN PERKARA MELALUI *CASE BUILDING*
2. PENYELESAIAN PERKARA DENGAN MENGOPTIMALKAN TPPU
3. PENYELESAIAN TUNGGAKAN KASUS DAN PERKARA
4. PENGELOLAAN ASET, BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

MEMPERBAIKI TATA KELOLA TUGAS PENINDAKAN DAN TUGAS SUPERVISI

1. PENYUSUNAN PEDOMAN PENINDAKAN TERINTEGRASI
2. PENYUSUNAN PEDOMAN PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN TERINTEGRASI
3. STANDARDISASI METODE PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI DI BIDANG PENINDAKAN
4. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENINDAKAN TERINTEGRASI YANG RESPONSIF BAIK SIFATNYA STRATEGIS MAUPUN PERIODIK
5. EFEKTIVITAS SUPERVISI KPK TERHADAP INTANSI TERKAIT, DENGAN CARA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM YANG DIFOKUSKAN PADA KOMPETENSI PEMULIHAN ASET DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- ❑ MEMASTIKAN PELIMPAHAN PERKARA KPD APH UTK MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN TETAP
- ❑ MEMASTIKAN PENGAMBILALIHAN PERKARA DARI APH UTK MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN TETAP
- ❑ MENINGKATKAN SINERGI DGN APH DLM MEMBANGUN SISTEM PELAPORAN PENANGANAN PERKARA TPK YG DILAKUKAN INSTANSI TERKAIT
- ❑ MEMPERKUAT KOORDINASI & SUPERVISI PENINDAKAN DLM KERJASAMA PENANGANAN PERKARA (*JOINT INVESTIGATION*) UTK PERKARA YG SULIT & KOMPLEKSITASNYA TINGGI

PENANGANAN PERKARA TPK

1. PENETAPAN KRITERIA/FOKUS PENANGANAN TPK
 - ❑ MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK (GAKKUM, POLITIK, PENDIDIKAN, KEDAULATAN PANGAN, PERIKANAN, KESEHATAN, SOSIAL, HANKAM)
 - ❑ BERDAMPAK SIGNIFIKANTHD PEREKONOMIAN NASIONAL (PENERIMAAN NEGARA, INFRASTRUKTUR, SDA, KEUANGAN NEGARA, PERBANKAN)
 - ❑ PENANGANAN PERKARA YG MJD FOKUS RPJMN 2020-2024, RKP 2020, CPI, PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA
2. MENYUSUN BOBOT KRITERIA KASUS DAN PERKARA DI SETIAP TAHAPAN PENINDAKAN → PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, LABUKSI SERTA TUGAS KOORDINASI & SUPERVISI PENINDAKAN UTK MENDAPATKAN PENGUKURAN YG TEPAT

MENYUSUN PETA PROSES BISNIS PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN TERINTEGRASI (MELIBATKAN TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS KOORDINASI, TUGAS SUPERVISI, TUGAS MONITORING, DAN TUGAS FUNGSI PENDUKUNG LAINNYA)

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1 SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN DAN MEMASTIKAN PELAKSANAAN ANGGARAN (LAYAK UNTUK DIBIYAI) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU (*COMPTROLLER*)
- 2 MEMASTIKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KPK TELAH MEMENUHI KONDISI UNTUK MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
- 3 IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN BERBASIS RISIKO TERMASUK ANALISA, INFORMASI DAN PROYEKSI PEMANFAATAN ANGGARAN MENUJU KPK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
- 4 IMPLEMENTASI, SOSIALISASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN SAKTI
- 5 MENYESUAIKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PROSES BISNIS BERDASARKAN EVALUASI ORGANISASI DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 6 SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENSTRA KPK TAHUN 2020-2024 BESERTA *MILESTONES*
- 7 PENINGKATAN DAN EVALUASI PROSES BISNIS DENGAN MELAKUKAN SIMULASI PROSES BISNIS PADA ASPEK EFISIENSI WAKTU, TENAGA DAN BIAYA AGAR *SERVICE LEVEL AGREEMENT* KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN LEBIH TERUKUR

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Biro Umum



ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Biro SDM

1

PENYELESAIAN TRANSISI MANAJEMEN SDM KPK BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2019 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

2

MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI AUDIT SDM DARI ACCENTURE YANG SELARAS DENGAN PROSES TRANSISI PEGAWAI MENJADI ASN TERMASUK IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM, PELAKSANAAN ROTASI & MUTASI PEGAWAI SERTA EVALUASI EFEKTIFITAS PEMANFAATAN *FLEXY-TIME* TERHADAP KEHADIRAN PEGAWAI KPK DI KANTOR

3

MELAKUKAN EVALUASI SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

4

PEMBANGUNAN MANAJEMEN INFORMASI SDM YANG TERINTEGRASI DAN EVALUASI KEAMANAN INFORMASI TERKAIT DATA DAN INFORMASI PEGAWAI KPK

5

PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI REGULASI TERKAIT SDM

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Biro Hukum



HARMONISASI REGULASI DAN PENYELESAIAN *LEGAL DRAFTING* PERATURAN INTERNAL KPK SEBAGAI TURUNAN PELAKSANAAN UU NO 19 TAHUN 2019



MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PRODUK HUKUM EKSTERNAL UNTUK MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAIK INTERNAL TERMASUK EKSTERNAL (REGULASI NASIONAL) UNTUK KEBUTUHAN TUGAS KPK



PENYUSUNAN REGULASI ATAU DUKUNGAN KEBIJAKAN TEKNIS ATAS HASIL PENGUKURAN INDIKATOR DAN/ATAU REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERDASARKAN OPINI BPK, INDEKS MATURITAS SPIP, NILAI SAKIP, INDEKS SPBE, DAN PENGUKURAN LAINNYA SECARA NASIONAL YANG MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA KPK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Biro Humas



1

PENYAMPAIAN INFORMASI KPK YANG BERSIFAT POSITIF, MEREDAM INFORMASI NEGATIF DAN MELAKUKAN KONTER OPINI NEGATIF TERHADAP KPK, MELALUI JURU BICARA KPK, SALURAN PUBLIKASI LAINNYA DAN KOMUNIKASI MASSA KEPADA PUBLIK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI ORGANISASI



2

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI SERTA DOKUMENTASI KEGIATAN KPK KEPADA PIHAK EKSTERNAL DAN INTERNAL



3

DISEMINASI KEBIJAKAN INTERNAL (PERATURAN KOMISI, KEPUTUSAN KOMISI, SURAT EDARAN, DLL) DAN KEBIJAKAN EKSTERNAL KPK



4

PENGUATAN KOMUNIKASI ORGANISASI (INTERNAL) KPK DAN MEMBANGUN INTERNALISASI BUDAYA KERJA KPK DAN NILAI-NILAI DASAR KPK

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

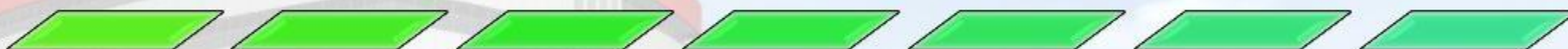
Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

1. SEKRETARIAT JENDERAL – Pusat Edukasi Antikorupsi dan Diklat

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM PEMENUHAN KOMPETENSI TEKNIS KEBUTUHAN TUGAS KPK DAN FUNGSI PENDUKUNG LAINNYA KPK (PROAKTIF)



MENYUSUN KALENDER DIKLAT DAN MENYESUAIKAN TNA (TRAINING NEEDS ANALYSIS) SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI KPK



PEMBANGUNAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM (KMS)



ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

2. BIDANG INFORMASI DAN DATA

1	2	3	4	5
IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE), <i>ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA)</i> , INTEGRASI DATA MELALUI PEMANFAATAN <i>MOBILE INTERNET, CLOUD COMPUTING, BIG DATA</i> , DAN <i>INTERNET OF THINGS</i>	IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) YANG TERUKUR	MENYUSUN DAN MENETAPKAN PETA PROSES BISNIS INFORMASI DAN DATA (PJKAKI, PINDA, DAN MONITOR) UNTUK MENGHASILKAN KEGIATAN BERSIFAT PROAKTIF BERBASIS INFORMASI INTELIJEN (<i>INTELLIGENT CYCLE</i>)	PENGEMBANGAN <i>ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA)</i> KPK YG MENDUKUNG KESELARASAN DGN SEMUA DIMENSI ORGANISASI YG MELIPUTI DIMENSI PROSES BISNIS DAN RISIKO YG DIKELOLA OLEH BIRO PERENCANAAN & KEUANGAN, DIMENSI KPI YG DIKELOLA OLEH BIRO SDM, DIMENSI REGULASI YANG DIKELOLA OLEH BIRO HUKUM SERTA DIMENSI DATA, APLIKASI, LAYANAN SPBE, TEKNOLOGI & KEAMANAN YG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PENGOLAHAN INFORMASI & DATA	PENERAPAN TATA KELOLA EA KPK UNTUK MENETAPKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP UNIT KERJA DALAM PENGELOLAAN EA

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

2. BIDANG INFORMASI DAN DATA

DIREKTORAT PJKAKI

- PEMETAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KERJASAMA KOMISI DAN INSTANSI UNTUK PEMENUHAN DATA DAN INFORMASI TUGAS KPK TERINTEGRASI PADA SATU SISTEM BASIS DATA
- MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI GUNA Mendukung PELAKSANAAN TUGAS Pencegahan dan Penindakan
- PENGUMPULAN DATA BERBASIS SIKLUS INTELIJEN UNTUK Mendukung EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ORGANISASI

DIREKTORAT PINDA

- PEMANFAATAN *BIG DATA ANALYSIS* UNTUK KEBUTUHAN PEMBERANTASAN KORUPSI KHUSUSNYA DALAM Mendukung 6(ENAM) TUGAS KPK
- INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATA TERINTEGRASI
- PENGOLAHAN DATA BERBASIS SIKLUS INTELIJEN UNTUK Mendukung EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ORGANISASI
- PENERAPAN EA DENGAN *TOOLS* YANG TERPADU DAN MUDAH UNTUK Mendukung KOLABORASI PENGELOLAAN EA KPK YANG TERINTEGRASI

DIREKTORAT MONITOR

- IMPLEMENTASI SIKLUS INTELIJEN MELALUI ANALISIS DATA UNTUK Mendukung EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ORGANISASI
- PEMETAAN DAN PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS DATA PADA LEVEL STRATEGIS, TAKTIKAL, SERTA BERDASARKAN RESIKO ANCAMAN

ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

Arahan Pimpinan KPK - Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK (Prime Mover / Enabler)

3. PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL

1. MEMINIMALISIR KEBOCORAN INFORMASI (PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO)
2. MEMASTIKAN PENGGUNAAN KEUANGAN KPK DAN KOREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN KPK UNTUK MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
3. PENGENDALIAN ATAS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPK BERDASARKAN TEMUAN BPK MAUPUN REKOMENDASI SAKIP, INDEKS MATURITAS SPIP, INDEKS MATURITAS SPBE, INDEKS SISTEM MERIT
4. EVALUASI KEBIJAKAN KPK MELALUI DETEKSI MITIGASI RISIKO, AUDIT KINERJA, AUDIT KEUANGAN, AUDIT SDM, AUDIT TI DAN TUGAS PENGENDALIAN INTERNAL LAINNYA SECARA PRUDENT, EFEKTIF, DAN HOLISTIK
5. KONSISTENSI PENEGAKAN ATURAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN MENUJU *ZERO TOLERANCE*

PENGADUAN MASYARAKAT

1. LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DUGAAN TPK MENGUTAMAKAN SKALA PRIORITAS PADA
 - ☐ PENGADUAN DUGAAN TPK BERDASARKAN FOKUS CPI, RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2020
 - ☐ MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK (PENEGAKAN HUKUM, POLITIK, PENDIDIKAN, KEDAULATAN PANGAN, PERIKANAN, KESEHATAN, SOSIAL, PERTAHANAN DAN KEAMANAN)
 - ☐ BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL (PENERIMAAN NEGARA, INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA ALAM, KEUANGAN NEGARA, PERBANKAN)
2. PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN PENYESUAIAN PROSES BISNIS DAN SOP PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERUBAHAN TUGAS KPK DENGAN MELIBATKAN TUGAS PENINDAKAN, TUGAS PENCEGAHAN, TUGAS KOORDINASI, TUGAS SUPERVISI, TUGAS MONITORING, DAN TUGAS FUNGSI PENDUKUNG LAINNYA
3. PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KOORDINASI KPK DALAM WHISTLE BLOWER SYSTEM DENGAN K/L DAN APH

TINDAK LANJUT ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

INSTRUKSI PIMPINAN

1. MENYUSUN PROGRAM KERJA, KONTRAK KINERJA, DAN TARGET KINERJA 2020 DAN MENYESUAIKAN PENGANGGARANNYA

2. MENYIAPKAN DRAF PROGRAM KERJA, KONTRAK KINERJA, DAN TARGET KINERJA BESERTA PENGANGGARAN UNTUK TAHUN 2021

3. MENJABARKAN AKU KPK 2020 DAN TARGET KINERJA KPK 2020 KE DALAM:

- ☐ PROGRAM KERJA DAN PENGANGGARAN KEDEPUTIAN/SEKRETARIAT JENDERAL DAN DIREKTORAT/BIRO/UNIT KERJA LAINNYA
- ☐ KONTRAK KINERJA DEPUTI/SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO/KOORDINATOR UNIT KERJA LAINNYA YANG DISETARAKAN

4. MENGOPTIMALKAN PERAN KEPALA SEKRETARIAT MAUPUN MANAJER KINERJA YANG MEWAKILINYA (MANAJER KINERJA ORGANISASI, MITRA MANAJER KINERJA ORGANISASI, WALI DATA DAN PIC ANGGARAN):

- ☐ PENGUMPULAN, PENYUSUNAN PENGUKURAN, ANALISIS, PEMANTAUAN, EVALUASI, SERTA PENYAJIAN BAHAN/DATA DALAM MENJALANKAN:
 - SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS (PEMBANGUNAN STRATEGI, PENERJEMAHAN STRATEGI, PENYELARASAN, PERENCANAAN OPERASIONAL, MONITOR DAN PEMBELAJARAN, PENGUJIAN DAN ADAPTASI)
 - SIKLUS MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI (PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTERIM, EVALUASI TAHUNAN) DI LINGKUNGAN UNIT KERJA ESELON I DAN ESELON II
- ☐ PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT BAIK UNTUK KEBUTUHAN STRATEGIS, PERIODIK MAUPUN SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PUBLIK
- ☐ MEMBANTU DEPUTI/SEKRETARIS JENDERAL UNTUK BERKOORDINASI DENGAN UNIT KERJA TERKAIT DALAM MENJALANKAN SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS DAN SIKLUS MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

5. MENYIAPKAN PETA JALAN 2020-2024 UNIT KERJA BESERTA PROGRAM KERJA, KONTRAK KINERJA, DAN TARGET KINERJA BESERTA PENGANGGARANNYA SEBAGAI MASUKAN RENSTRA KPK 2020-2024

6. BERKOORDINASI DENGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS 2020-2024, PROGRAM KERJA (SASARAN, INDIKATOR, TARGET), KONTRAK KINERJA DAN MANUAL IKU SERTA ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

7. MENYAMPAIKAN SALINAN DOKUMEN KEPADA PIMPINAN KPK, SEKRETARIS JENDERAL, DEPUTI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT (PIPM) DAN KELOMPOK KERJA STRATEGIS PIMPINAN (KKSP)

8. DEPUTI BIDANG PIPM DAN SEKRETARIAT JENDERAL MENGEVALUASI CAPAIAN KINERJA SELURUH UNIT KERJA SECARA BERKALA DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN DENGAN TEMBUSAN KE KKSP



**SEKIAN &
TERIMA KASIH**